

## **POLITIK TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH**

**Norma Juainah<sup>1</sup> , Izomiddin<sup>2</sup> , Puspita Rahmawati<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Indonesia*<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [normajuainah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:normajuainah_uin@radenfatah.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Artikel ini tentang Politik Tata kelola dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah teori model Peter Eisinger dalam proses politik. Data dikumpulkan dan dianalisis melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan politik pembangunan daerah Kabupaten Jakabaring disebabkan oleh proses politik. Pertama, kekuatan politik mempunyai peluang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik dalam proses persetujuan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD dan walikota. Kedua, kebijakan dipengaruhi oleh tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, yang menyangkut kajian dan rencana pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, lokasi diidentifikasi dan pihak terkait dihubungi. Terakhir, pada tahap pelaksanaan pengembangan wilayah, capaian-capaian sudah terlihat jelas dan nyata. Faktor yang mempengaruhi tahap perencanaan antara lain rencana pembangunan daerah dipengaruhi oleh kekuatan politik pada tahap pengesahan dan persetujuan keputusan (protokol), khususnya Walikota dan DPRD atas lahan yang terendam banjir dan milik swasta yang sulit dikelola.*

**Kata Kunci :** *Politik Tata Kelola, Pengembangan Wilayah*

### **ABSTRACT**

*This article is about the Politics of Governance and Development of the Jakabaring District, Palembang City. The theory used is Peter Eisinger's model of the political process. Data was collected and analyzed through documents and interviews. The research results show that the political management of regional development in Jakabaring Regency is caused by the political process. First, political power has the opportunity to influence political decision making in the process of approving regional development plans implemented by the DPRD and mayor. Second, policy is influenced by three stages, namely the planning stage, which involves studies and development plans. In the implementation phase, locations are identified and relevant parties are contacted. Finally, at the implementation stage of regional development, achievements are clearly visible and tangible. Factors that influence the planning stage include regional development plans being influenced by political forces at the ratification and approval stage of decisions (protocols), especially the*

*Mayor and DPRD for land that is flooded and private property that is difficult to manage.*

**Keywords:** *Governance Politics, Regional Development*

## **PENDAHULUAN**

Dalam mengelola pengembangan wilayah tata kelola diperlukan desain tata kelola yang kompleks yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah. Salah satu hal yang penting dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana pemerintah memposisikan tugas pokok dan fungsi dalam mengembangkan wilayah.

Tata Kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari aspek politik dan ekonomi yang menjadi dasar pembangunan dan perbaikan, yang didapat memiliki kewenangan dalam hal administratif untuk dapat mengelola urusan nasional di semua alur dan tingkatan. Implementasi ekonomi meliputi proses pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemerataan, pengentasan kemiskinan menengah kebawah dan kualitas hidup serta pelaksanaanyang dimaksud dalam tata kelola dan pengembangan kota adalah proses dimana keputusan diambil untuk memformulasikan suatu kebijakan yang dilansir menjadi suatu sistem implementasi dari suatu kebijakan tersebut yang direncanakan adalah yang disebut sebagai pelaksanaan yang dilakukan secara administratif. (Oheo K.Haris,2015)

Politik tata kelola merupakan proses yang menjadi terbentuk berdasarkan suatu hasil interaksi antara aktor-aktor pada pembangunan di kota dan membicarakan tentang bagaimana para aktor tersebut mengambil keputusan terkait cara mereka merencanakan, membiayai dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan. Politik tata kelola dapat membentuk karakter fisik dan sosial dari kawasan perkotaan, dan berdampak pada jumlah dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Kota Palembang memiliki permasalahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mempertahankan pertumbuhan. Perbedaan fasilitas, jarak antar wilayah, jumlah penduduk dan perbedaan kualitas sumber daya baik kandungan sumber daya alam maupun sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota Palembang.

Jumlah penduduk di Kota Palembang pada tahun 2016 sebanyak 1.602.071 jiwa, terdiri dari 802.990 laki-laki dan 799.081 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36%. Kepadatan penduduk kota Palembang pada tahun 2016 mencapai 3.999 jiwa/km<sup>2</sup>, tertinggi di kecamatan Ilir Timur I, terendah di kecamatan Gandus 916 jiwa/km<sup>2</sup>. Selain masalah kependudukan, pertumbuhan ekonomi

kota Palembang juga berasal dari perbedaan utilitas yang ada di setiap kecamatan. Mengutip hasil penelitian Imelda dkk (2013:22), pusat pertumbuhan utama kota Palembang pada tahun 2013 adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II. Pusat pertumbuhan sekunder adalah Ilir Barat 1 dan II (barat Palembang), Sukarami (utara Palembang), Kalidoni (timur) dan Seberang Ulu 2 (selatan Palembang) dan Sako (timur Palembang) sedangkan kabupaten lainnya adalah pedalaman Kota Palembang.

Tata Kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari aspek politik dan ekonomi yang menjadi dasar pembangunan, yang memiliki kewenangan administratif untuk mengelola urusan nasional di semua tingkatan. Implementasi ekonomi meliputi proses pengambilan keputusan. Jika melihat dari simpulan tersebut, hanya ada satu kecamatan di kawasan Seberang Ulu yang menjadi pusat pertumbuhan kota Palembang pada tahun 2013, yaitu kecamatan Seberang Ulu II dan dapat disimpulkan bahwa kecamatan lain di kawasan Seberang Ulu di kota Palembang hanyalah daerah pedalaman. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur antara kawasan Seberang Ulu dan Ilir kota Palembang. Banyak pusat pemerintahan, kantor pemerintahan dan gedung pusat yang terletak di distrik Seberang Ilir Palembang. Hal ini merupakan salah satu faktor tidak

seimbang nya pembangunan antara kawasan pemukiman Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang.

Berdasarkan peraturan daerah no. 15 Tahun 2012 Bab VI Kawasan Strategis Kota Palembang berdasarkan manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

kawasan di Jakabaring dimaksudkan untuk menjadi kawasan terpadu yang memiliki banyak kantor pemerintahan provinsi, luas kawasan komersial, pusat kegiatan olah raga dan pusat perumahan. Pengembangan kawasan Jakabaring erat kaitannya dengan penerapan SOP tahun 2004.

Selama perkembangannya, kawasan Seberang Ilir lebih maju dibandingkan kawasan Seberang Ulu. Kawasan Seberang Ilir dijalankan lebih sebagai pusat pelayanan utama di tingkat nasional, provinsi dan kota. Sebagian besar pusat niaga berskala besar seperti pasar tradisional, pasar daerah, dan pusat niaga terkonsentrasi di kawasan ini. Kantor-kantor pemerintah dan swasta juga berdesakan di kawasan ini. Begitu pula perumahan dan permukiman yang juga berkembang pesat di kawasan Seberang Ilir. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan tidak terlalu seimbang antara Seberang Ilir dan Seberang Ulu.

Pembangunan kota yang terkonsentrasi di kawasan seberang ilir menyebabkan terjadinya urbanisasi. Jembatan Ampera yang menghubungkan bagian utara

(seberang iir) dan selatan (seberang ulu) dari dua pemukiman yang telah terpisah selama berabad-abad ini memang mempercepat pergerakan berbagai aktivitas dari selatan ke utara. Utara berkembang pesat dan selatan tertinggal.

Dalam pengelolaan pengembangan kawasan Jakabaring tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya kekuasaan politik dan pengaruh politik yang melibatkan khalayak umum atau masyarakat. Misalnya dalam pembuatan keputusan atau pembuatan mengenai kebijakan, kekuatan politik memiliki peran yang sangat penting. Dan hasil dari keputusan tersebut akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

tusan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan masalah pemerataan, pengentasan kemiskinan dan kualitas hidup serta pelaksanaanyang dimaksud dalam tata kelola kota adalah proses keputusan untuk memformulasikan kebijakan yang dimana menjadi sistem implementasi dari kebijakan tersebut adalah yang disebut dengan pelaksanaan secara administratif.

Dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Jakabaring terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat mulai dari hal yang menjadi alasan pemerintah mengalihkan kawasan perkantoran yang akan dialihkan ke Kawasan Keramasan seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi dalam wawancara di Tribun

Sumsel bahwa Kawasan Keramasan ini menjadi primemover atau penggerak perekonomian di kawasan tersebut. Serta pembenahan kawasan khususnya di tepian sungai. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Politik Tata Kelola Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang”.

## **METODE**

Dalam penelitian Politik Tata Kelola Pengembangan Wilayah di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba mendeskripsikan pengembangan wilayah kota Palembang. Adapun didapat sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan informan dan data sekunder melalui observasi dan dokumentasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai Kepala Subbidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah (Bappeda Litbang Kota Palembang), Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Jakabaring, dan juga

mewawancarai beberapa masyarakat Kecamatan Jakabaring.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti misalnya, diperoleh dari buku, jurnal, skripsi tesis, artikel, berita, dan internet yang berkaitan dengan politik tata kelola pengembangan wilayah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada dasarnya pengembangan wilayah bertujuan untuk kemakmuran wilayah dengan menilai secara optimal seluruh potensi yang ada, mengusahakan keselarasan dan keseimbangan pembangunan antar daerah agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan teori model proses politik Peter Eisinger yang memiliki dua unsur sebagai berikut:

### **1. Kekuatan Politik**

Kekuatan-kekuatan politik yang didapat saling berinteraksi dan berkaitan dalam sistem politik yang dijalankan pada hakikatnya merupakan unit-unit politik yang turut andil dalam pembentukan struktur politik. Dari perspektif perilaku, individu dianggap sebagai unit yang terkecil dalam suatu sistem politik. Oleh karena itu, sebagai individu dapat dianggap sebagai bagian dari kekuasaan politik, terutama mereka yang menjadi pemimpin politik. Dalam suatu sistem politik, terdapat unit-unit politik yang dapat membentuk suatu

sistem politik diekspresikan melalui tindakan politik.

Tindakan politik dijadikan sebagai tindakan yang melibatkan proses pengambilan keputusan yang mengikat secara sosial atau tindakan yang mempengaruhi implementasi politik dan menegaskan bahwa kekuasaan politik tidak lain hanyalah subyek politik atau orang-orang yang mempunyai peranan dalam kehidupan politik, baik dalam bentuk lembaga, organisasi atau bentuk lain dalam proses pembuatan.

Misalnya media massa yang memiliki rangkaian tanggung jawab yang sangat penting dalam hal memajukan pembangunan dan suatu kehidupan berdemokrasi yang berjalan dengan baik untuk menghubungkan antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Peran media massa sangat penting karena pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam tata kelola pengembangan wilayah di kawasan Jakabaring penyebaran informasi mengenai rencana pengembangan kawasan Jakabaring cukup bagus dan dapat ditemukan di beberapa website berikut, Tribun Sumsel, [palembang.tribunnews.com](http://palembang.tribunnews.com), [sindonew.com](http://sindonew.com), [bpiw.go.id](http://bpiw.go.id), [sumsel.antarnews.com](http://sumsel.antarnews.com), [sumatera.bisnis.com](http://sumatera.bisnis.com), dan [palembang.go.id](http://palembang.go.id).

Peran serta berbagai pihak menjadi penting dalam membantu keterlibatan

Pemerintahan Kota Palembang, karena tidak bisa semua kegiatan pembangunan dapat dilakukan sendiri, terutama dari segi sumber daya manusia (SDM) dan dana anggaran yang tersedia bisnis. Bentuk kerjasama antara pihak swasta atau bisnis, dalam pelibatan hal ini pengusaha, disebut dengan kemitraan publik-swasta (KPS).

Public Private Partenership (PPP) ini merupakan suatu hubungan kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha Real Estate dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Jakabaring melalui pembiayaan dan investasi. Keterlibatan antara pihak swasta dan bisnis yang dianggap sangat mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya mampu membantu pihak pemerintahan sebagai motor dalam pelaksana pembangunan. Kerjasama yang dapat terjalin antara pemerintah dan para pengusaha ini tentunya memiliki kepentingan tertentu seperti pembangunan kompleks perumahan oleh perusahaan Real Estate tersebut sebagai memanfaatkannya sebagai tujuan ekonomi.

Dalam politik tata kelola pengembangan wilayah di Kecamatan Jakabaring tidak lepas dari pengaruh kekuatan politik mulai dari proses pengesahan yang di sahkan oleh DPRD dan Walikota dalam penentuan pengembangan wilayah yang tentunya di latar belakang oleh hal-hal yang berbau unsur politik, sosial dan ekonomi.

## 2. Pengaruh Politik (Keterlibatan Masyarakat)

Dalam pengaruh politik memiliki tiga fase yaitu fase perencanaan dan fase kesepakatan yaitu :

### a) Fase Perencanaan

Dalam mengelola pengembangan kawasan jakabaring pada fase perencanaan telah dilakukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Detil Ruang (RDTR). dengan adanya Rencana Detil Tata Ruang (RTDR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kawasan yang di rencanakan akan dibangun yang selanjutnya menimbulkan beberapa efek pembangunan dan pengembangan di daerah sekitar kawasan Jakabaring.

### b) Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan Jakabaring tetapi juga bagi daerah disekitarnya yang terbelakang. Tidak hanya itu pengembangan kawasan jakabaring tidak hanya sekedar melakukan pembangunan saja tetapi juga untuk menata dan mengelola kawasan kumuh di pinggir.

### c) Fase Kesepakatan

Upaya perencanaan didasarkan atas dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pihak-pihak yang terlibat di

dalam pengelolaan sumber daya wilayah (masyarakat lokal, pendatang dan pengusaha), pemerintah dan perencana. Pada fase kesepakatan perencanaan hal pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan area planning yaitu menentukan dan memetakan lokasi, ukuran batas batas, akses dan pusat-pusat populasi.

- d) Dalam fase kesepakatan hal yang harus dilakukan yaitu menghubungi pihak yang terlibat. Sebelum mengambil keputusan apapun, perwakilan para petani dan pengguna tanah yang lain yang akan dipengaruhi oleh rencana harus dihubungi dan diperhatikan pandangannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pandangan mendalam bagi tim perencana mengenai situasi yang sesungguhnya dan kedua hal ini berarti para pengguna tanah akan menyadari perubahan-perubahan yang terjadi daripada dihadapkan dengan sesuatu yang dipaksakan dari penguasa.
- e) Pada fase kesepakatan perencanaan telah menghubungi dan mensosialisasikan mengenai perencanaan pengembangan di Kawasan Jakabaring melalui CSR (Corporate Sosial Responsibility) atau Tanggung

Jawab Perusahaan Pusri yang ada di Kawasan Jakabaring.

f) Fase Pelaksanaan

Setelah melakukan perencanaan dan membuat kesepakatan hal selanjutnya yang harus dilakukan tentunya mengimplementasikan rencana tersebut. Kawasan Jakabaring tentunya memiliki potensi-potensi yang ada seperti 1) Bersinggungan dengan sungai yang merupakan salah satu sumber air baku. Selain sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana transportasi air. 2) Memiliki kelengkapan fasos fasum yang mendukung perkembangan kegiatan perkotaan (Universitas Bina Darma, Universitas Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, OPI Waterfun, OPI Mall dan lain-lain); 3) Merupakan daerah sentral kegiatan perkonomian khususnya ekonomi rumah tangga meliputi industri makanan dan kerajinan; 4) Terintegrasi dengan berbagai sistem moda transportasi, termasuk LRT sehingga berpotensi dikembangkan sebagai Kawasan Berbasis Area Transit (Transit Oriented Development); dan 5) Memiliki pusat olahraga terbesar skala internasional pusat olahraga

jakabaring yang digunakan dalam ASEAN Games 2018.

kawasan di Kecamatan Jakabaring masih belum sepenuhnya memadai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan tentang hasil penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu : Politik tata kelola dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Jakabaring, bahwa dalam pengelolaan pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya kekuatan politik dan pengaruh politik (keterlibatan masyarakat). Pertama dengan adanya kekuatan politik dalam proses pengesahan rencana pengembangan wilayah yang dilakukan oleh DPRD dan Walikota implementasi pengembangan wilayah di Kecamatan Jakabaring dapat dilakukan.

Kedua, pengaruh politik dalam keterlibatan masyarakat pada fase perencanaan telah dilakukan bahwa kawasan Jakabaring telah ditetapkan dalam rencana kawasan strategis kota Palembang. Pada fase kesepakatan perencanaan lokasi telah ditetapkan di kawasan Jakabaring. Pada fase implementasi program pengembangan wilayah realisasinya sudah bisa dilihat dan berjalan dengan baik. Karena Pemkot belum sepenuhnya mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga akan muncul berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan Jakabaring. Dan juga solusi untuk mengatasi kendala yang ada selama pengelolaan pengembangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Miriam. 2008. D asar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Eisinger, Peter, "The oretical Models in Urban Politics" dalam Ronald K. Vogel (ed.), Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States (London: Greenwood Press, 1997).
- Hadjisarosa, P. 1980. Konsep D asar Pengembangan Wilayah. Bandung: DPU.
- Irwanto, Dedi 2010. Ven esia Dari Timur : Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial. Yogyakarta : Ombak
- Mutfy, Muslim. 2013. Kekuatan Politik di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia
- Rustadi, Ernan dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
- Samsu, 2017. Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)

- Yusuf, Muri. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Alian, Muhammad Arief. (2013) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kota Palembang. Jurnal Tekno Global. Universitas Indo Global Vol II No.1
- Apriansyah, Muhammad Adjie. 2018. Analisis Pusat Pertumbuhan Di Kawasan Seberang Ulu Kota Palembang. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Imelda dkk. 2013. Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Daerah Hinterland Kota Palembang. Laporan Penelitian Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Nisak, Afidatun. 2019. Politik Tata Kelola Infrastruktur Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016-2018. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uin Walisongo Semarang.
- Nurpiena, Dea Siti. Dkk. 2015. Ekonomi Kota : Tata Kelola Kota Dan Pelayanan Publik. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Wicaksono, Bambang. (2003). Kajian Perkembangan Kawasan Seberang Ulu Sebagai Arah Pengembangan Kota Palembang Bagian Selatan. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badan pusat statistik palembang : Jumlah penduduk kota palembang (jiwa) 2019-2021 diakses dari <https://palembangkota.bps.go.id>
- Chaebar, Haris. 2019. Stadion Jakabaring. Diakses di <https://www.tribunnewswiki.com>
- Gischa, Serafica. 2020. Konsep Wilayah dan Pewilayahan: Definisi serta Pembagiannya diakses di <https://www.kompas.com>
- MC Kota Palembang (2021). Penduduk terpadat di sumsel diakses dari <https://infopublik.id>
- Profil kota palembang, diakses dari <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id>
- Palembang.tribunnews.com. (2022). Keramasan Menjadi Pusat Gravitasi Perekonomian Baru Kota Palembang. Diakses di <http://palembang.tribunnews.com>
- Priherdtyo, Endro. 2014. Jakabaring, Wajah Baru Olahraga Indonesia. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com>
- Ramdhani, Ani. 2019. Pengertian Pengembangan, Jenis, dan Contohnya diakses di <https://www.pinhome.id>

**Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**

Volume 10, Nomor 1, February 2024

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Submitted 20 January 2024, Reviewed 1 February 2024, Publish 26 February 2024 ( 67-76)

ISSN: 2442-3777 (cetak)

ISSN: 2622-691X (online)

Sulistyo, Eko Budi. 2021. Pengertian  
Tata Kelola Pemerintahan.

Diakses dari

<http://staff.unila.ac.id>

Peraturan Daerah Kota Palembang  
Nomor 15 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah Tahun 2012-2032

Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR

Perencanaan Pembangunan

Infrastruktur Permukiman

Kota Baru Palembang